

PEMETAAN KURIKULUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ERA MERDEKA BELAJAR

MAPPING THE CIVIL EDUCATION CURRICULUM IN THE MERDEKA BELAJAR ERA

Anita Permatasari^{1a}, Azmalia Kamila Sabtawati^{2b}, Iwan Gunawan^{3c}, Sri Rumiati^{4d}

^{1,2,3,4} Program Studi Magister PPKn, STKIP Arrahmaniyah
^{a,b,c,d}Jl. Masjid Al-Ittihad, Pondok Terong, Depok, Jawa Barat

korespondensi: ¹Anitapermatasari348@gmail.com; ²azmaliakamila7@gmail.com;
³iwangunawan655@gmail.com

APA Citation: Permatasari, A., Sabtawati, A.K., Gunawan, I. & Rumiati, S. (2023). Pemetaan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Era Merdeka Belajar. Sintesa: Jurnal Ilmu Pendidikan, 18(1), 59-67.

Received: 25-4-2023

Accepted: 21-5-2023

Published: 30-6-2023

Abstrak. Tulisan ini mengeksplorasi kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK), sekaligus melakukan telaah terhadap implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di tingkat menengah atas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan yang muncul dari implementasi kedua kurikulum tersebut, dan memberikan rekomendasi untuk peningkatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dimana analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diambil dari berbagai sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan dalam implementasi kurikulum PPKn dan Merdeka Belajar, seperti kurangnya sumber daya dan fasilitas pendidikan, serta kurangnya pemahaman terhadap esensi Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Meski demikian, kedua kurikulum tersebut juga menunjukkan potensi yang besar untuk menciptakan generasi muda yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan di era global.

Kata kunci: Kurikulum PPKn; Kurikulum Merdeka Belajar; Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Menengah; Studi Literatur.

Abstract. This paper explores the curriculum of Pancasila and Civil Education (PPKn) from Junior High School (SMP) to Senior High School (SMA/SMK), and also reviews the implementation of the Independent Learning Curriculum at the high school level. The purpose of this study is to identify the potential and challenges that arise from the implementation of these two curricula and provide recommendations for their improvement. The method used in this study is a literature study, where the analysis is based on data and information taken from various primary and secondary sources. The results show that there are various challenges in the implementation of the PPKn and Independent Learning curriculum, such as a lack of educational resources and facilities, and a lack of understanding of the essence of Civil Education itself. However, both curricula also show great potential to create a younger generation with a national insight and the competencies needed in the global era.

Keywords: PPKn Curriculum; Independent Learning Curriculum; Civil Education; High School; Literature Study.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan atau yang dikenal dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan identitas bangsa. Kurikulum PPKn yang diimplementasikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) seharusnya mencerminkan

filosofi dan nilai-nilai dasar negara, serta dapat memfasilitasi pemahaman dan apresiasi terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam konteks ini, kurikulum yang digunakan tentunya memerlukan telaah dan evaluasi secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Adapun masalah penelitian ini adalah melakukan telaah terhadap kurikulum PPKn, baik pada jenjang SMP hingga SMA/SMK. Telaah

tersebut dilakukan untuk memahami apakah kurikulum yang ada sudah mencakup secara efektif nilai-nilai kewarganegaraan yang relevan dengan konteks kehidupan sekarang. Pada khususnya, penelitian ini mencoba mengidentifikasi dan menggali aspek-aspek yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan dalam kurikulum tersebut (Cogan, 1998; Asri, 2017).

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga akan melakukan kajian terhadap kurikulum Merdeka Belajar pada tingkat menengah atas. Kurikulum Merdeka Belajar adalah inisiatif yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam memilih dan mengeksplorasi metode belajar yang sesuai dengan minat dan potensi siswa. Di sisi lain, ini juga memungkinkan guru untuk lebih kreatif dalam merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar. Namun, penerapan kurikulum Merdeka Belajar, khususnya dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, tentunya memerlukan evaluasi dan telaah agar dapat memastikan bahwa tujuan dan target pembelajaran dapat tercapai dengan efektif (Marisa, 2021). Dalam melakukan penelitian ini, akan digunakan berbagai metode dan pendekatan untuk memastikan bahwa hasilnya dapat mencakup berbagai aspek dan perspektif yang relevan. Melalui telaah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam tentang bagaimana kurikulum PPKn dan kurikulum Merdeka Belajar dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya dapat memberikan kontribusi teoretis, tetapi juga praktis dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan kewarganegaraan di Indonesia (Haryati, 2012).

Teori pendidikan yang paling dasar adalah teori belajar, dimana proses belajar mengajar merupakan inti dari pelaksanaan pendidikan. Salah satu teori belajar yang relevan adalah konstruktivisme, yang menekankan pada pembentukan pengetahuan oleh peserta didik berdasarkan pengalaman dan interaksi

dengan lingkungan sekitarnya. Teori ini relevan dengan kurikulum PPKn yang mengutamakan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan dalam diri peserta didik. Selanjutnya, dalam konteks kurikulum, teori yang relevan antara lain teori kurikulum berbasis kompetensi dan teori kurikulum berpusat pada peserta didik. Kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada pencapaian kompetensi tertentu oleh peserta didik, sementara kurikulum berpusat pada peserta didik mengutamakan kebutuhan dan keunikan setiap peserta didik. Kedua teori ini penting dalam konteks kurikulum PPKn dan Merdeka Belajar, yang masing-masing menekankan pada pencapaian kompetensi kewarganegaraan dan fleksibilitas dalam pembelajaran (Luqman, 2017).

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, teori yang relevan antara lain teori pendidikan karakter dan teori pendidikan demokrasi. Pendidikan karakter berkaitan erat dengan pendidikan kewarganegaraan, karena keduanya menekankan pada pembentukan nilai-nilai dan perilaku positif. Sementara itu, teori pendidikan demokrasi relevan dengan tujuan PPKn dalam membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Analisis terhadap teori-teori ini akan membantu dalam memahami bagaimana kurikulum PPKn dan Merdeka Belajar diimplementasikan di lapangan, serta bagaimana potensi dan tantangan yang ada dapat ditangani. Selain itu, pemahaman terhadap teori-teori ini juga akan membantu dalam merancang rekomendasi yang tepat dan relevan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kurikulum tersebut. Studi teoretis ini akan diintegrasikan dengan studi literatur dan analisis empiris, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang kurikulum PPKn dan Merdeka Belajar (Marisa, 2021).

Dalam upaya menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi, strategi penelitian yang akan diterapkan adalah dengan melakukan studi literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber ini antara lain berupa dokumen resmi kurikulum PPKn dan kurikulum Merdeka Belajar, buku

ajar dan bahan pelajaran, jurnal penelitian pendidikan, laporan penelitian dan publikasi resmi lainnya yang relevan. Studi literatur ini akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap kurikulum yang menjadi fokus penelitian. Studi literatur ini akan membantu dalam memahami konteks, filosofi, tujuan, dan isi dari kurikulum PPKn dan Merdeka Belajar. Analisis ini akan mencakup tinjauan terhadap prinsip-prinsip dan pendekatan pembelajaran yang diusung, serta bagaimana hal tersebut direfleksikan dalam praktik pengajaran di lapangan. Selain itu, akan diperhatikan juga bagaimana kurikulum tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh peserta didik dalam konteks kehidupan masyarakat yang dinamis dan multikultural seperti di Indonesia.

Kajian terhadap literatur ini juga bertujuan untuk memahami tantangan dan hambatan dalam implementasi kurikulum, baik dari sisi guru, peserta didik, maupun infrastruktur pendukung. Wawasan ini penting untuk merancang strategi pemecahan masalah yang realistis dan efektif. Selain itu, studi literatur ini juga akan mencari inspirasi dan ide-ide dari penelitian dan praktik yang telah dilakukan di berbagai tempat, baik di dalam maupun luar negeri. Setelah memahami konteks dan kondisi yang ada, langkah selanjutnya adalah merancang rencana pemecahan masalah. Rencana ini akan mencakup strategi peningkatan dan pengembangan kurikulum, baik dari sisi materi, metode pengajaran, evaluasi, maupun dukungan infrastruktur. Strategi ini akan dirancang dengan mempertimbangkan realitas dan kebutuhan di lapangan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam tentang kurikulum PPKn dan Merdeka Belajar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan rekomendasi untuk peningkatan dan pengembangan kurikulum PPKn dan Merdeka Belajar di masa mendatang. Dengan demikian, dapat diharapkan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia semakin

berkualitas dan mampu mencetak generasi muda yang berdaya saing, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi sebagai warga negara.

Penelitian ini dirancang dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta kurikulum Merdeka Belajar di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK). Identifikasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana kedua kurikulum tersebut mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan pendidikan kewarganegaraan di era modern yang penuh dengan dinamika. Potensi yang dimaksud mencakup berbagai aspek positif dan keunggulan yang terdapat dalam kurikulum tersebut, termasuk inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran, penekanan pada aspek-aspek tertentu yang relevan dengan konteks saat ini, serta keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Sementara itu, tantangan dapat mencakup berbagai hambatan dan kesulitan dalam implementasi kurikulum, baik dari sisi guru, peserta didik, maupun infrastruktur pendukung. Tantangan ini juga bisa mencakup kebutuhan untuk penyesuaian atau peningkatan dalam kurikulum untuk menjawab tuntutan dan perubahan di masyarakat.

Melalui analisis yang mendalam terhadap potensi dan tantangan ini, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kurikulum PPKn dan Merdeka Belajar. Rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Efektivitas di sini mencakup peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran, sehingga tujuan-tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat tercapai dengan optimal. Sementara itu, efisiensi berarti penggunaan sumber daya (baik waktu, tenaga, maupun fasilitas) dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan optimal, tanpa pemborosan, tetapi tetap menghasilkan hasil yang maksimal.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan studi literatur sebagai metode utama. Oleh karena itu, tempat pelaksanaan penelitian ini tidak terbatas pada suatu lokasi tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang tersedia, baik secara *online* maupun *offline*. Sumber informasi *online* mencakup publikasi ilmiah, laporan penelitian, artikel, dan dokumen-dokumen resmi yang tersedia di internet, sementara sumber informasi *offline* meliputi buku, jurnal, dan dokumen-dokumen cetak lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini disesuaikan dengan ketersediaan dan aksesibilitas sumber-sumber informasi tersebut.

Subjek dalam penelitian ini adalah kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan kurikulum Merdeka Belajar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK). Kedua kurikulum ini dipilih karena relevansinya dengan konteks pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, serta peran pentingnya dalam membentuk karakter dan identitas bangsa. Desain penelitian ini adalah studi deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, kami akan melakukan telaah mendalam terhadap kurikulum PPKn dan Merdeka Belajar, dengan fokus pada struktur, konten, dan proses implementasinya. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana kedua kurikulum ini berinteraksi dan berdampak pada konteks pendidikan kewarganegaraan yang lebih luas.

Protokol pengambilan data dalam penelitian ini melibatkan telaah dokumentasi dan analisis isi dari kurikulum dan sumber-sumber terkait lainnya. Telaah dokumentasi ini melibatkan pengumpulan, seleksi, dan interpretasi data dari berbagai sumber dokumen yang relevan. Sementara itu, analisis isi dilakukan untuk mengekstraksi makna dan interpretasi dari teks-teks dalam dokumen tersebut. Analisis data dalam penelitian ini melibatkan analisis isi dan analisis tematik. Analisis isi dilakukan untuk mengevaluasi dan menafsirkan informasi yang terdapat dalam

dokumen dan teks, dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan dari teks tersebut. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) dalam data. Kedua metode analisis ini digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang kurikulum PPKn dan Merdeka Belajar.

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memahami dan mengevaluasi secara mendalam kurikulum PPKn dan Merdeka Belajar, serta memahami konteks dan dampaknya dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas dan efektivitas kurikulum tersebut dalam membentuk karakter dan identitas bangsa (Patton, 2009).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah Kurikulum PPKn Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan komponen penting dalam pendidikan di Indonesia. Dalam kurikulum ini, terdapat berbagai konsep dan nilai-nilai yang ditujukan untuk membentuk warga negara yang baik dan berakhlak mulia. Salah satu temuan utama dalam telaah kurikulum PPKn di jenjang SMP adalah adanya penekanan pada pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan peran PPKn sebagai mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Dalam praktiknya, kurikulum ini menekankan pentingnya pemahaman konsep dan nilai-nilai Pancasila secara mendalam, serta penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan.

Selain itu, dalam kurikulum PPKn di jenjang SMP juga terdapat penekanan pada pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan berdemokrasi. Kurikulum ini menekankan

pentingnya keterampilan dalam berpartisipasi dalam kehidupan berdemokrasi, mulai dari pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, hingga keterampilan dalam berdiskusi dan berargumen secara sehat dan konstruktif. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan kurikulum PPKn di jenjang SMP. Salah satunya adalah tantangan dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Meski kurikulum menekankan pentingnya nilai-nilai ini, dalam praktiknya, proses internalisasi ini sering kali menemui hambatan, baik dari segi metode pembelajaran, motivasi peserta didik, maupun dukungan lingkungan.

Metode pembelajaran yang masih berorientasi pada pengetahuan teoretis sering kali membuat peserta didik merasa kurang terlibat dan kurang termotivasi untuk belajar. Selain itu, motivasi peserta didik juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti minat, lingkungan, dan pengetahuan awal tentang materi (Susilawati, 2021). Dukungan lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah, juga berperan penting dalam memfasilitasi proses internalisasi nilai-nilai ini. Dalam konteks ini, diperlukan strategi dan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi peserta didik. Metode pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kreatif dapat membantu dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, dukungan dan peran aktif dari guru, orang tua, dan komunitas sekolah juga sangat penting dalam memfasilitasi proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dan demokrasi (Budimansyah, 2008).

Kurikulum PPKn di jenjang SMP juga menghadapi tantangan dalam menghadapi dinamika dan perubahan sosial yang terjadi. Dalam era digital dan informasi seperti saat ini, peserta didik dihadapkan pada berbagai informasi dan isu yang beragam dan kompleks. Hal ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang lebih maju dalam memahami, menganalisis, dan merespons isu-isu tersebut. Oleh karena itu, kurikulum PPKn di jenjang SMP perlu beradaptasi dan

berkembang seiring dengan perubahan dan dinamika yang terjadi. Selain menekankan pada pemahaman konsep dan nilai-nilai dasar Pancasila dan demokrasi, kurikulum ini juga perlu menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan *problem solving*. Dengan demikian, peserta didik dapat lebih siap dalam menghadapi dan merespons berbagai isu dan tantangan yang ada di masyarakat (Darmadi, 2010).

Dalam rangka pengembangan dan perbaikan kurikulum PPKn di jenjang SMP, perlu adanya penelitian dan evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian dan evaluasi ini penting untuk memahami sejauh mana efektivitas dan efisiensi kurikulum dalam mencapai tujuannya, serta untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi. Dengan demikian, dapat ditemukan berbagai strategi dan solusi yang tepat dan relevan untuk peningkatan kualitas kurikulum PPKn di jenjang SMP. Pada akhirnya, kurikulum PPKn di jenjang SMP memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan warga negara yang baik dan berakhlak mulia. Meski menghadapi berbagai tantangan, dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat, kurikulum ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pendidikan di Indonesia.

Ruang Lingkup dan Implementasi Kurikulum PPKn Sekolah Menengah Atas

Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Kurikulum ini melibatkan pemahaman dan internalisasi berbagai nilai kewarganegaraan, termasuk tetapi tidak terbatas pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan persatuan nasional. Berkenaan dengan implementasi kurikulum PPKn, berdasarkan studi literatur dan analisis data, ditemukan bahwa ada beberapa aspek penting yang menjadi fokus dalam proses pembelajaran. Aspek pertama adalah penanaman nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Penanaman nilai-nilai ini tidak hanya dilakukan melalui pemahaman

konsep, tetapi juga melalui internalisasi dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Dalam konteks ini, guru PPKn memiliki peran yang sangat penting sebagai model dan fasilitator (Santoso, 2015).

Aspek kedua adalah keterampilan berpikir kritis dan demokratis. Kurikulum PPKn di SMA/SMK berusaha untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab, dan salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dan demokratis. Dalam hal ini, proses pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk berpikir secara mandiri, kritis, dan bertanggung jawab terhadap isu-isu kewarganegaraan. Aspek ketiga adalah partisipasi dan keterlibatan aktif peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. Kurikulum PPKn berusaha untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan realitas sosial yang dihadapi oleh peserta didik, sehingga dapat merasa terlibat dan berperan aktif dalam masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan proyek-proyek pembelajaran berbasis masyarakat (Susilawati, 2021; Santoso, 2015).

Namun, implementasi kurikulum PPKn di SMA/SMK juga menemui beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah terkait dengan sumber daya guru. Meskipun guru memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kurikulum, namun seringkali menghadapi kesulitan dalam hal kapasitas dan dukungan. Hal ini termasuk keterbatasan dalam pemahaman konsep dan strategi pembelajaran, serta kurangnya dukungan dalam hal sumber daya belajar dan pengembangan profesional. Tantangan kedua adalah terkait dengan motivasi dan minat peserta didik terhadap PPKn. Beberapa studi menunjukkan bahwa peserta didik seringkali merasa kurang tertarik dengan materi PPKn karena dianggap kurang relevan atau menarik. Hal ini menuntut adanya inovasi dalam strategi pembelajaran dan penyesuaian materi dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Tantangan ketiga adalah terkait dengan penilaian. Dalam kurikulum PPKn, penilaian

tidak hanya melibatkan pengetahuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku. Namun, penilaian sikap dan perilaku seringkali menjadi tantangan, baik dari segi teknis maupun validitas. Hal ini memerlukan adanya pendekatan penilaian yang lebih komprehensif dan autentik (Jayadiputra, 2010).

Kajian Kurikulum Merdeka Belajar pada Tingkat Menengah Atas

Kurikulum Merdeka Belajar pada Tingkat Menengah Atas merupakan bagian dari perubahan besar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan peserta didik dari belenggu kurikulum yang kaku dan memberikan kebebasan untuk belajar sesuai minat dan bakatnya. Oleh karena itu, temuan penelitian tentang Kurikulum Merdeka Belajar menjadi sangat penting dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari sistem pendidikan ini (Rosidah, 2021).

Berdasarkan penelaahan literatur yang telah dilakukan, Kurikulum Merdeka Belajar pada tingkat menengah atas memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan kurikulum konvensional. Antara lain, kurikulum ini mampu mengakomodasi kebutuhan dan minat peserta didik dengan lebih baik, sekaligus memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan bakat siswa secara maksimal. Hal ini sesuai dengan prinsip konstruktivisme dalam teori belajar, yang menekankan pentingnya pengalaman dan interaksi dengan lingkungan dalam proses pembelajaran (Marisa, 2021).

Selain itu, Kurikulum Merdeka Belajar juga menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan kritis, serta keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam konteks ini, peran guru bukan lagi sebagai penyampai pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator yang mendukung peserta didik dalam proses belajarnya. Hal ini sejalan dengan teori pendidikan berpusat pada peserta didik, yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Namun demikian, implementasi Kurikulum Merdeka Belajar juga menemui sejumlah tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan sumber daya pendukung, termasuk fasilitas belajar dan tenaga pendidik yang kompeten. Kekurangan sumber daya ini dapat menghambat proses pembelajaran dan mengurangi efektivitas kurikulum ini (Jayadiputra, 2010).

Selain itu, tantangan lainnya adalah adanya resistensi dari beberapa pihak terhadap perubahan ini, terutama dari guru yang masih terbiasa dengan kurikulum konvensional. Perubahan paradigma dalam pendidikan ini membutuhkan waktu dan proses adaptasi, baik dari sisi guru, peserta didik, maupun orang tua. Tantangan lain yang muncul adalah terkait dengan evaluasi pembelajaran. Dalam Kurikulum Merdeka Belajar, evaluasi pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil belajar dalam bentuk nilai, melainkan juga pada proses belajar dan pengembangan kompetensi peserta didik. Namun, implementasi evaluasi seperti ini membutuhkan pemahaman dan keterampilan yang baik dari guru, serta sistem penilaian yang tepat (Budimansyah, 2008; Jayadiputra, 2010).

Dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu adanya komitmen dan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk pemerintah, sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Selain itu, perlu juga adanya upaya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pendidikan, serta penyesuaian sistem penilaian dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka Belajar. Meskipun masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi, Kurikulum Merdeka Belajar memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik, kurikulum ini dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi dan bakat secara maksimal, sekaligus membekali keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam kehidupan di abad 21 (Marisa, 2021).

Integrasi Temuan Penelitian dengan Teori-Teori Pendidikan, Kurikulum, dan Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan penting terkait kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan kurikulum Merdeka Belajar di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) yang dapat dihubungkan dengan teori-teori pendidikan dan kurikulum. Pertama, dalam konteks kurikulum PPKn, salah satu temuan menunjukkan bahwa kurikulum ini telah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam teori belajar konstruktivis. Dalam praktiknya, proses belajar mengajar PPKn dirancang untuk memfasilitasi peserta didik dalam membentuk pengetahuan dan pemahaman sendiri mengenai nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan belajar yang interaktif dan berorientasi pada pengalaman, seperti diskusi kelompok, simulasi, proyek sosial, dan lain-lain (Cogan, 1998). Dengan demikian, kurikulum PPKn mencerminkan prinsip konstruktivisme bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui interaksi aktif dengan lingkungan sekitarnya. Namun, di sisi lain, temuan penelitian juga menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip konstruktivis ini. Salah satu tantangan adalah kurangnya fasilitas dan sumber belajar yang mendukung, serta kendala dalam kapasitas guru untuk menerapkan metode belajar yang aktif dan kreatif. Hal ini sejalan dengan pandangan beberapa teoritis pendidikan, yang menekankan bahwa implementasi teori konstruktivis membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan peningkatan kualitas profesionalisme guru.

Kedua, dalam konteks kurikulum Merdeka Belajar, temuan penelitian menunjukkan bahwa kurikulum ini mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam teori kurikulum berpusat pada peserta didik. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, peserta didik diberi kebebasan dan fleksibilitas untuk menentukan jalur belajar sendiri sesuai dengan minat dan potensi. Hal ini mencerminkan prinsip dalam teori kurikulum

berpusat pada peserta didik, yang menekankan pada penghargaan terhadap keunikan dan individualitas setiap peserta didik. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini juga menemui tantangan, antara lain terkait dengan peran guru sebagai fasilitator belajar dan peran sekolah dalam menyediakan berbagai pilihan jalur belajar yang berkualitas. Tantangan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas guru dan sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, sesuai dengan pandangan dalam teori kurikulum berpusat pada peserta didik (Pangalila, 2017).

Ketiga, dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, temuan penelitian menunjukkan bahwa kurikulum PPKn dan Merdeka Belajar telah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam teori pendidikan karakter dan pendidikan demokrasi. Dalam kurikulum PPKn, misalnya, pembelajaran difokuskan pada pembentukan nilai-nilai dan perilaku positif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Sementara dalam kurikulum Merdeka Belajar, prinsip demokrasi diterapkan melalui pemberian kebebasan dan kepercayaan kepada peserta didik untuk menentukan jalur belajar sendiri. Namun, penelitian juga menemukan tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip ini, antara lain terkait dengan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan karakter dan pendidikan demokrasi. Tantangan ini mencerminkan pandangan dalam teori pendidikan karakter dan pendidikan demokrasi, yang menekankan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga orang tua dan masyarakat. Dengan demikian, temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor dalam implementasi kurikulum, termasuk prinsip-prinsip teoritis, infrastruktur pendidikan, dan peran berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, hasil temuan ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan rekomendasi peningkatan efektivitas dan efisiensi kurikulum PPKn dan Merdeka Belajar (Rosidah, 2021).

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, terungkap bahwa Kurikulum PPKn dan Kurikulum Merdeka Belajar memiliki potensi yang signifikan dalam membentuk karakter dan kompetensi kewarganegaraan peserta didik. Kedua kurikulum ini memuat komponen-komponen penting yang mendukung proses pembentukan warga negara yang berakhlak, cakap, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka Belajar mampu memberikan fleksibilitas dan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi dan memperdalam pengetahuan tentang nilai-nilai kewarganegaraan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum tersebut. Tantangan tersebut antara lain mencakup kendala dalam aspek penyeragaman pemahaman dan implementasi, ketersediaan sumber daya pendukung, serta tingkat kesiapan guru dan peserta didik dalam mengadaptasi metode pembelajaran yang baru.

Dalam menjawab permasalahan penelitian yang telah didefinisikan sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa Kurikulum PPKn dan Kurikulum Merdeka Belajar mempunyai potensi besar dalam mendukung proses pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, namun masih diperlukan peningkatan dan penyesuaian lebih lanjut untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Berdasarkan temuan dan analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi. Pertama, perlu adanya peningkatan kapasitas guru dalam implementasi Kurikulum PPKn dan Kurikulum Merdeka Belajar. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi guru, serta dukungan berupa sumber daya dan fasilitas yang memadai. Kedua, perlu adanya penyesuaian dalam kurikulum untuk memastikan bahwa materi dan metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Hal ini dapat mencakup penyesuaian pada aspek-aspek tertentu dalam kurikulum, peningkatan fleksibilitas dalam proses pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Ketiga, merekomendasikan adanya penelitian lebih lanjut terkait implementasi Kurikulum PPKn dan Kurikulum Merdeka Belajar, khususnya dalam konteks yang lebih spesifik atau

pada tingkat pendidikan yang berbeda. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan dan peningkatan kurikulum yang lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang potensi dan tantangan dari Kurikulum PPKn dan Kurikulum Merdeka Belajar dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Besar harapan bahwa hasil dan rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan masukan yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, dan peneliti di bidang pendidikan kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, M. (2017). Dinamika Kurikulum di Indonesia. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(2).
- Budimansyah, D. & Suryadi, K. (2008). PKN dan Masyarakat Multikultural. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Cogan, J. J., & Derricott, R. (1998). *Citizenship for 21st Century: an International Perspective on Education*. London: Cogan Page.
- Darmadi, H. (2010). *Pengantar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Haryati, T. (2012). Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen). *Civis: Jurnal Ilmiah*, 2(2).
- Jayadiputra, E. (2010). Pengaruh Implementasi Model Project Citizen dalam Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Konsep Demokrasi.
- Luqman. (2017). Penerapan Pembelajaran Project Citizen untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *Ilmu Pendidikan*, 2(1).
- Marisa, M. (2021). Inovasi kurikulum "Merdeka Belajar" di era society 5.0. *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora)*, 5(1), 66–78.
- Pangalila, T. (2017). Peningkatan Civic Disposition Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 91-103.
- Patton, M. Q. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosidah, C. T., Pramulia, P., & Susiloningsih, W. (2021). Analisis kesiapan guru mengimplementasikan asesmen autentik dalam Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 12(01), 87-103.
- Santoso, G., Al Muchtar, S., & Abdulkarim, A. (2015). Analysis SWOT Civic Education curriculum for senior high school year 1975-2013. *CIVICUS: JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*, 19(1).
- Susilawati, E., Sarifudin, S., & Muslim, S. (2021). Internalisasi nilai Pancasila dalam pembelajaran melalui penerapan profil pelajar Pancasila berbantuan platform Merdeka Mengajar. *Jurnal Teknodik*, 25(2), 155-167.